



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kepala BNPB
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 14 September 2023
Waktu	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Penyesuaian RKA K/L sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.,
Sekretaris Rapat	: Dicky Rachmadi, S.A.P.
Hadir	: 1. 21 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri Agama RI (Yaqut Cholil Qoumas); 3. Menteri Sosial RI, diwakili oleh Sekjen Kemensos RI (Robben Rico 4. Menteri PP&PA RI (I Gusti Ayu Bintang Darmawati); 5. Kepala BNPB (Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.); 6. Jajaran Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Kementerian PP&PA RI serta Jajaran BNPB.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas "**Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2024 Kementerian Agama sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah**" disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, sebesar Rp74.068.406.173.000,- (*tujuh puluh empat triliun enam puluh delapan miliar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), dengan rincian berdasarkan Unit Eselon I sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Pagu Anggaran TA 2024 (dalam ribu rupiah)
1	Sekretariat Jenderal	32.611.355.080
2	Inspektorat Jenderal	179.111.682
3	Ditjen Bimas Islam	2.320.819.644
4	Ditjen Pendidikan Islam	34.731.937.146
5	Ditjen Bimas Kristen	809.371.788
6	Ditjen Bimas Katolik	341.749.248
7	Ditjen Bimas Hindu	480.272.138
8	Ditjen Bimas Buddha	203.970.038
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.378.932.271
10	Badan Litbang dan Diklat	670.209.307
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	340.677.831
Total		74.068.406.173

2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024 menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Merealisasikan rencana kenaikan honor penyuluh Non PNS pada tahun 2024 sebesar Rp500.000,-, sehingga yang awalnya sebesar Rp1.000.000,-, menjadi Rp1.500.000,-,
 - b. Mendorong kenaikan kesejahteraan tenaga kependidikan dan guru honorer di lingkungan Kementerian Agama RI.
 - c. Memastikan bahwa lembaga pendidikan agama dan keagamaan terdaftar di pusat data Kementerian Agama untuk memudahkan dan mengintensifkan pembinaan dan pengawasan.
 - d. Menyelesaikan tunjangan profesi guru (TPG) dan *inpassing* yang terhutang.
 - e. Mempercepat pembahasan BPIH tahun 2024 dengan membentuk Panja BPIH dengan target dapat diselesaikan awal Nopember 2023

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda pembahasan **“Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah”** dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah sebesar Rp79.214.083.464.000,- (*Tujuh Puluh Sembilan Triliun Dua Ratus Empat Belas Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

UNIT KERJA ESELON I	PAGU ANGGARAN TA 2024
<u>Sekretariat Jenderal</u>	Rp 689.751.076.000,-
<u>Inspektorat Jenderal</u>	Rp 44.408.329.000,-
<u>Ditjen Rehabilitasi Sosial</u>	Rp 2.489.703.297.000,-
<u>Ditjen Perlindungan & Jaminan Sosial</u>	Rp 30.510.393.371.000,-
<u>Ditjen Pemberdayaan Sosial</u>	Rp 45.479.827.391.000,-
TOTAL	Rp 79.214.083.464.000,-

2. Komisi VIII DPR RI memahami usulan tambahan anggaran sebesar Rp2.843.297.982.000,-, yang belum terpenuhi dalam pagu anggaran Kementerian Sosial RI TA 2024.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024 menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - f. Meningkatkan sukses salur bantuan sosial yang langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - g. Meningkatkan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) karena sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.
 - h. Meningkatkan honor tenaga pendamping sosial di lingkungan Kementerian Sosial sesuai dengan beban kerja.
4. Komisi VIII DPR RI akan mengadakan rapat dengan Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Daerah untuk membahas perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai ketentuan Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin untuk memastikan bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran.

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda membahas "**Penyesuaian RKA-KL Tahun Anggaran 2024 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah**" disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2024, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, sebesar Rp**311.636.724.000** (*Tiga Ratus Sebelas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan rincian per unit kerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Pagu Anggaran TA 2024
1	Sekretariat Kementerian	141.909.568.000
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	27.717.323.000
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	27.207.867.000
4	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	0
5	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	47.837.884.000
6	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	51.483.950.000
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	15.480.132.000
Jumlah		311.636.724.000

2. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024 menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut :
 - a. Mendukung DAK Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2024 sebesar Rp132.000.000.000,-,
 - b. Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2024 untuk mencapai target yang direncanakan secara maksimal.
3. Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk terlibat aktif dalam penyusunan RPJP 2025-2045.

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda membahas "Penyesuaian RKA-KL Tahun Anggaran 2024 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah" disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran BNPB Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah sebesar Rp. 959.719.643.000,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dengan rincian per unit kerja sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN TA 2024
A	Program Dukungan Manajemen	273.112.353.000
1	Sekretariat Utama	259.076.453.000
2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	7.635.900.000
3	Inspektorat Utama	6.400.000.000
B	Program Ketahanan Bencana	686.607.290.000
1	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	9.150.000.000
2	Deputi Bidang Pencegahan	175.676.778.000
3	Deputi Bidang Penanganan Darurat	259.691.788.000
4	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	13.200.000.000
5	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	15.276.500.000
6	Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	81.000.000.000
7	Pusat Pengendalian Operasi	132.612.224.000
Grand Total		959.719.643.000

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran BNPB tahun 2024 sebesar Rp694.179.100.000,-

3. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024 menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut :
- a. Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2024 untuk mencapai target yang maksimal.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan bencana.
 - c. Mengupayakan pengalokasian Dana Siap Pakai (DSP) untuk mengatasi bencana.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.,